

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Jumlah kekerasan pada Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi sangat meningkat sehingga penandatanganan *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* dilakukan oleh Indonesia pada tahun 2014 dengan Arab Saudi didorong oleh tiga faktor determinan dengan pendekatan *decision making process*.

Pertama, *Kondisi Politik Domestik (dalam negeri) Indonesia*. Pada variabel determinan pertama ini meninjau dari empat jenis *influence* yang ditinjau yaitu birokrat, partai politik, kelompok kepentingan dan media masa. Dalam birokrat terdapat kementerian dan lembaga negara yang mendorong adanya penandatanganan perjanjian, yaitu Kemenakertrans dan BNP2TKI. Dalam pandangan dua lembaga negara tersebut adanya *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* akan menjadi landasan hukum untuk melindungi tenaga kerja Indonesia atau buruh migran terutama di sektor rumah tangga. Hal tersebut didasari pada realita dari tuntutan pekerjaan yang tinggi dari warga Indonesia ke Arab Saudi. Sehingga meskipun terdapat moratorium tetap saja banyak pengiriman tenaga kerja ilegal dan tingginya angka kekerasan yang dilakukan oleh majikan, maka untuk mengantisipasi hal tersebut disepakati dan ditandatangani *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers*. Sementara itu dalam partai politik, kelompok kepentingan seperti asosiasi pengusaha dan Migrant Care hanya memberikan komentar untuk pemerintah agar lebih berhati-hati dalam proses negosiasi terutama dalam

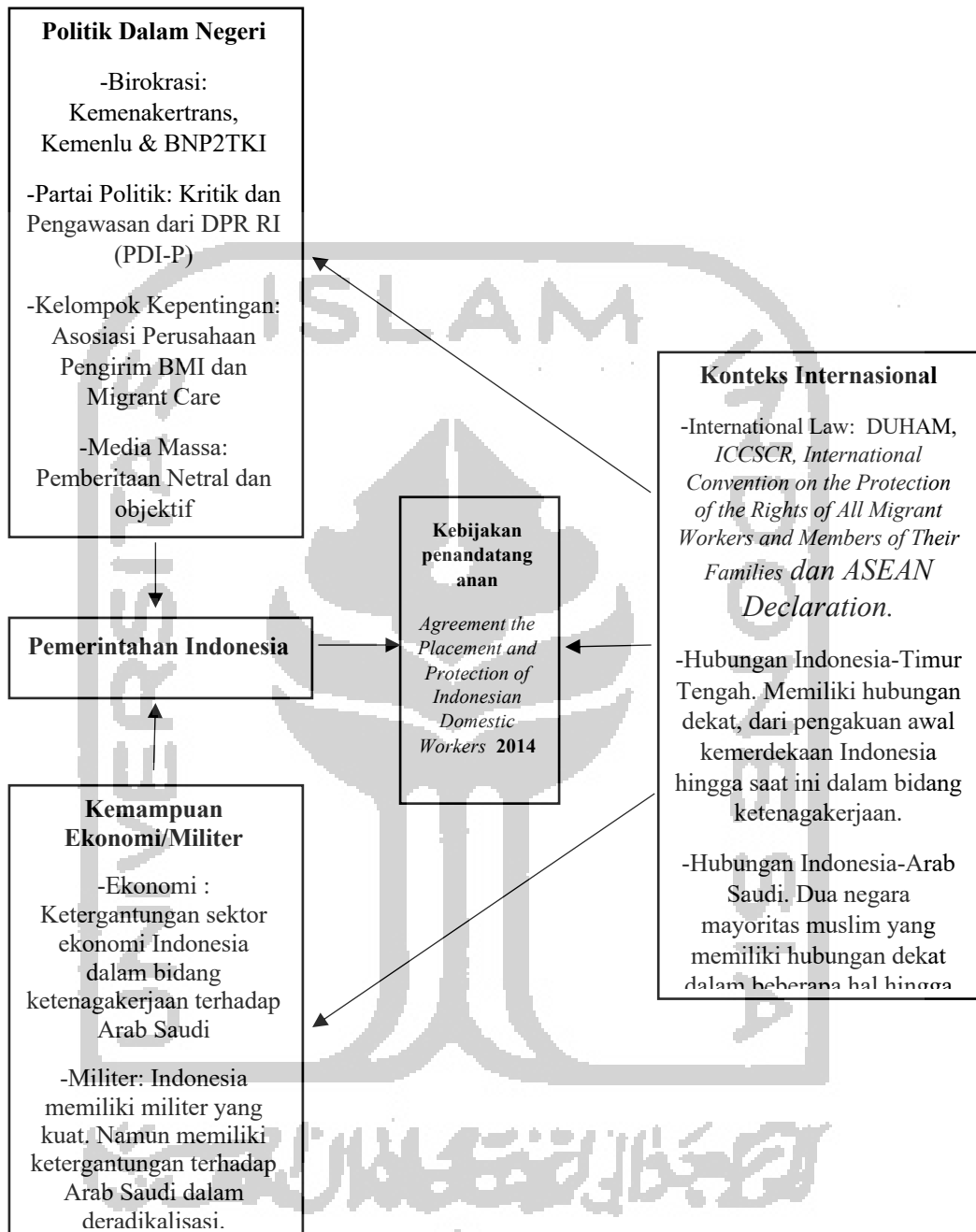
pengupahan yang lebih merugikan bagi Tenaga Kerja Indonesia. Dalam perjanjian tersebut terdapat kritikan dan dukungan bagi anggota parlemen DPR RI. Dari pihak dukungan yaitu partai koalisi pemerintah mempunyai alasan bahwa adanya laporan yang membahas mengenai kinerja Tim Pengawas TKI yang memfokuskan pada mekanisme rekrutmen dan hal teknis lainnya, mengingat perjanjian ini menjadi rujukan utama untuk penempatan TKI negara Timur Tengah terutama di Arab Saudi. Sementara perjanjian tersebut mendapatkan kritikan terutama dari partai koalisi non-pemerintah dikarenakan perjanjian tersebut langung tanpa melalui konsultasi terlebih dahulu kepada DPR RI. Disamping itu dalam sisi media massa tidak memberitakan pemberitaan yang banyak, dan masih netral dan objektif. Sehingga dengan penjelasan diatas maka pihak birokrat adalah *influence* yang memiliki pengaruh besar dari variabel determinan kondisi politik domestik Indonesia.

Kedua, variabel determinan Kondisi Ekonomi dan Keamanan. Dalam hal ini dalam bidang ekonomi, Indonesia masih memiliki ketergantungan yang cukup signifikan terhadap Arab Saudi. Hal ini didasari pada sektor tenaga kerja Indonesia yang masih menjadikan Arab Saudi sebagai tujuan utama dalam bekerja. Disamping itu, Indonesia juga secara berturut-turut mengalami defisit perdagangan dengan Arab Saudi. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia masih membutuhkan Arab Saudi dalam beberapa bidang perdagangan, terutama dalam sektor minyak dan gas. Selain itu angka investasi langsung dari Arab Saudi ke Indonesia terus meningkat sehingga menghasilkan nilai investasi sebesar Rp 99 Triliun, hal tersebut juga mendorong bentuk ketergantungan lain Indonesia pada Arab Saudi. Sementara itu dalam bidang keamanan kekuatan militer Indonesia merupakan salah satu yang

terkuat di Asia, namun Indonesia juga masih memiliki ketergantungan terhadap pasokan alutista luar negeri. Meskipun demikian, kekuatan yang dimiliki Indonesia mampu untuk menghalau ancaman internal yang ada seperti terorisme. Dimana dalam terorisme, Arab Saudi menjadi mitra utama Indonesia dalam menanggulangi dan menekan terorisme melalui BNPT dengan pengiriman ulama-ulama Arab Saudi. Sehingga faktor ketergantungan dalam bidang ekonomi dan bidang keamanan penanggulangan terorisme merupakan faktor yang sangat berkontribusi besar dalam variabel determinan kondisi ekonomi dan keamanan.

Ketiga, variabel determinan terakhir adalah Konteks Internasional, dalam hal ini terdapat aturan-aturan internasional yang telah ditandatangani dan diratifikasi oleh Indonesia yang secara tidak langsung mendorong penandatanganan *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers*. Diantaranya adalah DUHAM, Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi ILO, Deklarasi ASEAN tentang hak buruh migran serta Konvensi Buruh Migran dan keluarnya. Instrument-instrumen hukum diatas telah ditandatangani dan sebagian diratifikasi oleh Indonesia. Sehingga kemudian menjadi komitmen Indonesia untuk melindungi pekejanya di luar negeri. Disamping itu hal lain adalah adanya hubungan baik Indonesia dan Timur Tengah serta Arab Saudi yang didasari pada faktor historis, agamis, dan ekonomi. Sehingga dalam variabel ketiga, maka norma hukum internasional dan kedekatan Indonesia dan Timur Tengah serta Arab Saudi sangat berpengaruh terhadap ditandatanganinya *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* oleh Indonesia. Adapun hal-hal penting dari tiga variable dari teori Willian D. Coplin tersebut telah di ilustrasikan pada bagan 5.1 dibawah ini.

Hasil Penelitian



Bagan 5.1 Hasil Penelitian

5.2 Saran Dan Rekomendasi

Penelitian ini membahas mengenai hal yang mendorong Indonesia dalam menandatangani perjanjian *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* pada tahun 2014 dengan Arab Saudi. Dengan begitu maka penelitian ini memiliki keterbatasan dalam membahas hal itu, sementara itu masih terdapat banyak aspek dalam tema penelitian ini yang perlu diperdalam untuk dijelaskan lebih lanjut, seperti misalnya implementasi *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* setelah tahun 2014 hingga saat ini pada tahun 2019. Perkembangan dalam penerapan *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* dengan negara-negara yang bekerja sama. Selain itu, mencari perbedaan dalam implementasi ketika moratorium berlangsung dan perjanjian *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* 2014 berlangsung. Sehingga penulis meyarankan agar peneliti selanjutnya menulis mengenai hal tersebut guna melanjutkan penelitian dan memahami lebih mendalam mengenai masalah ketenagakerjaan Indonesia di luar negeri terutama negara pada angka kekerasan tertinggi. Adapun untuk menjabarkan hal ini penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya menggunakan item atau pendekatan teori yang berbeda dan fokus pada alat analisis. Penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi inspirasi para mahasiswa Hubungan Internasional untuk meneliti keterlibatan pemerintah Indonesia dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia di negara timur tengah terutama Arab Saudi dan kerja sama dalam perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dengan negara timur tengah.

Selain itu, Pemerintah Indonesia sepantasnya memiliki konsistensi dan progres dalam jangka panjang dalam penyelesaian permasalahan Tenaga Kerja Indonesia

terutama tingkat kekerasan yang dilakukan majikan di negara lain dan permudah dan transparan dalam prosedur seleksi penerimaan Tenaga Kerja Indonesia sehingga menekan tenaga kerja ilegal serta mampu meningkatkan Devisa Negara dikarenakan pengiriman tenaga kerja Indonesia merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar dan dianggap masyarakat sebagai pahlawan devisa.

